

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Minggu ke III Bulan Februari 2021 (tanggal 13 s.d 18 Februari)



DEMOKRASI INKLUSIF DI MYANMAR

Humphrey Wangke
Peneliti Ahli Utama
dhanny_2000@yahoo.com

**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Di kala militer meningkatkan tekanan, ribuan orang kembali berunjuk rasa di Yangon, kemarin (17/2/2021). Massa memprotes kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari silam. Pengunjuk rasa menyuarakan keraguan atas janji junta bahwa akan ada pemilihan yang adil dan akan menyerahkan kekuasaan. Apalagi, aparat justru mengajukan tuntutan tambahan terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Utusan Khusus PBB Christine Schraner memperingatkan tentara Myanmar tentang konsekuensi dari setiap tanggapan keras mereka terhadap pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kudeta. Schraner Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya dan para demonstran tidak mengalami tindakan balasan.

Dunia sedang mengawasi dengan saksama dan segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah. Apa yang dapat dilakukan Indonesia agar masalah kudeta di Myanmar tidak menjadi masalah bagi ASEAN.

FUNGSI DPR

Pengawasan:

Melalui fungsi pengawasan, DPR agar mencermati diplomasi yang sedang digalang oleh Menlu Retno dalam mencari solusi damai di Myanmar untuk mencari kejelasan apa yang dilakukan Indonesia atas masalah kudeta di Myanmar.

Di satu sisi, Menlu Retno saat ini terus menggalang dukungan dan komunikasi dengan dunia internasional agar memberi perhatian bagi keselamatan rakyat dan proses demokrasi di Myanmar. Selain menggalang dukungan dari negara-negara ASEAN, Indonesia juga membuka komunikasi dengan AS dan Cina, dua negara yang bersaing berebut pengaruh di kawasan. Menlu Retno telah berkomunikasi dengan para menlu ASEAN serta sejumlah menlu negara lain, seperti India, Australia, Jepang, Inggris, dan Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai isu Myanmar.

Namun dilain sisi, Menlu Retno menegaskan kembali pendekatan konstruktif untuk menanggapi isu Myanmar. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk membantu Myanmar adalah prinsip *non-interference*, mengutamakan *constructive engagement*, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik di Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholder atau transisi demokrasi secara inklusif

■ ATENSI DPR RI

DPR agar mencermati pendekatan yang dilakukan Indonesia di Myanmar, disatu sisi mencari dukungan internasional, tetapi dilain sisi menerapkan prinsip nonintervensi. DPR mungkin perlu menggunakan fungsi diplomasi untuk membantu pemerintah mencari solusi terbaik di Myanmar. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas, namun demokrasi harus dihormati oleh militer Myanmar.

DPR seharusnya bisa terlibat dalam upaya mengamankan keberlanjutan transisi inklusif menuju demokrasi di Myanmar. Guna merespons perkembangan situasi di Myanmar. Dapat mendiskusikan perkembangan di Myanmar melalui berbagai forum parlemen yang ada.

■ SUMBER

Militer dan Rakyat Myanmar Terus Adu Kuat, *Media Indonesia*, 18 Februari 2021, hal. 2.
PBB Ingatkan Militer Myanmar Hindari Kekerasan, *Media Indonesia*, 17 Februari 2021 hal. 2.
Junta Tolak Tuduhan Kudeta, *Kompas* 17 Februari 2021, hal. 4.
Indonesia terus galang komunikasi, *Kompas* 18 feb 2021, hal. 4.

